

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pencurian sepeda motor merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi dan menjadi perhatian utama di masyarakat, termasuk di Kabupaten Karanganyar. Sepeda motor menjadi alat transportasi yang vital bagi sebagian besar penduduk di wilayah ini, tidak hanya sebagai sarana mobilitas, tetapi juga sebagai simpanan nilai ekonomis yang penting. Berdasarkan data dan hasil wawancara ditemukan hasil sebagai berikut

- 1) Tingkat efektivitas penyelesaian kasus pencurian sepeda motor oleh Polres Karanganyar dapat diukur dari tingkat persentase penyelesaian kasus yang mencapai lebih dari 50%. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengungkapan kasus pencurian sepeda motor di Polres Karanganyar dikatakan efektif karena melalui berbagai proses penyelidikan dan penyidikan hingga pada tahap eksekusi.
- 2) Adapun hambatan yang diperoleh yaitu sebagai berikut (a) Kurangnya Sumber Daya Manusia, (b) Kurangnya Sarana dan Prasarana, dan (c) Jaringan informasi yang terputus. Berdasarkan hasil penelitian tersebut penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi instansi Polres di Indonesia dalam menangani kasus pencurian sepeda motor agar dapat efektif seperti halnya yang dilakukan oleh Polres Karanganyar.

B. SARAN

1. Peningkatan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi petugas kepolisian yang terlibat dalam penanganan kasus pencurian motor.
2. Pengoptimalan penggunaan sumber daya manusia yang ada melalui redistribusi tugas dan tanggung jawab.
3. Kerjasama dengan pihak swasta atau lembaga non-pemerintah untuk mendapatkan dukungan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan.

4. Pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada.
5. Peningkatan koordinasi antara lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, jaksa, dan instansi terkait lainnya.
6. Implementasi sistem informasi yang terintegrasi untuk memfasilitasi pertukaran data dan informasi antarinstansi.
7. Pelatihan dan pendidikan bagi petugas kepolisian dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mengatasi hambatan komunikasi.
8. Advokasi kepada pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk meningkatkan alokasi anggaran khusus dalam penanganan kasus pencurian motor.
9. Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah, kepolisian, dan sektor swasta untuk menggalang sumber daya keuangan tambahan.